

**PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Hidayah Yulianty Harjono

NPM : 1621030107

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG**

1441 H/ 2020

**PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Hidayah Yulianty Harjono

NPM : 1621030107

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020**

ABSTRAK

Jaminan hari tua merupakan program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia. Program jaminan Hari Tua ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program jaminan hari tua ini memiliki pengembangan dana yang dikembangkan untuk diberikan kepada peserta yang akan mencairkan atau mengklaim dana jaminan hari tua tersebut. Jaminan hari tua ini untuk memenuhi kebutuhan para peserta jika peserta tidak lagi bekerja atau tidak aktif lagi bekerja dan jika peserta mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Yang akan penulis tinjau adalah mengenai pengembangan dana jaminan hari tua. Salah satu contohnya pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan yang melaksanakan program tersebut. Dana yang dikembangkan mengikuti sistem suku bunga BI Rate yang mana jika persentase dalam tahun tersebut naik, akan naik juga dana yang dikembangkan. Pada sistem pengembangan dana jaminan hari tua yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan dan 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan dalam pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan dan 2) untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan.

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menggunakan Sampel *Random Sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Sedangkan dalam pengumpulan data skripsi ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara,. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan terdapat unsur riba karena terdapat adanya sistem suku bunga yang naik dari persentase dan sumber dana yang dikelola dari obligasi atau surat utang yang mana jika suatu perusahaan mengembalikan uang atau pinjaman ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, uang tersebut harus diserahkan beserta bunganya. Kemudian bunga tersebut dijadikan dana untuk dikelola dalam jaminan yang ada di program pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayah Yulianty Harjono

NPM : 1621030107

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

Penulis

Hidayah Yulianty Harjono

NPM. 1621030107



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI TANGERANG
SELATAN)**

**Nama : Hidayah Yulianty Harjono
NPM : 1621030107
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
NIP. 195902151986031004**

Pembimbing II

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin M., S.I.
NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan"** disusun oleh Nama: Hidayah Yulianty Harjono NPM: 1621030107, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I

Sekretaris : Muslim, MHI

Penguji Utama : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag

Penguji Pendamping I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag

Penguji Pendamping II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si



**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Raden Intan Lampung**

DR. H. Khaliduddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolong dalam melakukan perbuatan keji dan permusuhan”.

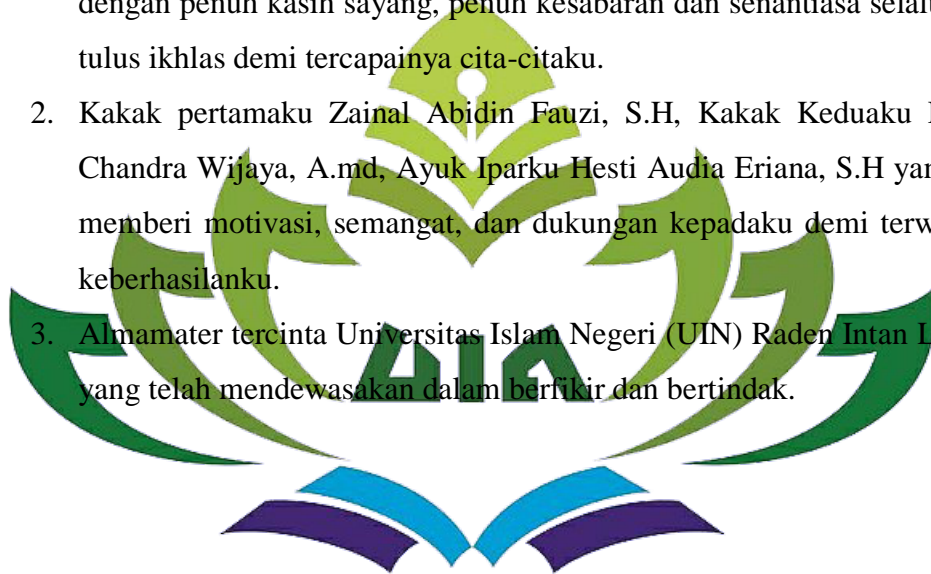
(QS. Al-Maidah (5): 2)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu Tuhan Yang Maha Esa, atas takdirmu menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Joni Jidan dan Ibunda Noncik Hasan yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak pertamaku Zainal Abidin Fauzi, S.H, Kakak Keduaku Humaidi Chandra Wijaya, A.md, Ayuk Iparku Hesti Audia Eriana, S.H yang selalu memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Hidayah Yulianty Harjono putri ketiga dari pasangan Ayahanda Drs. Joni Jidan dan Ibunda Noncik Hasan. Lahir di Palembang, 11 juli 1998. Mempunyai saudara kandung yaitu dua kakak laki-laki yang bernama Zainal Abidin Fauzi, S.H dan Humaidi Chandra Wijaya, A.Md.

Riwayat pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Amalia Tanjung Senang Bandar Lampung pada Tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004.
2. Sekolah Dasar Negeri 3 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dan Hukum dimulai pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas selesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci ungkapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung;

4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi;
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I selaku Pembimbing II yang selama ini dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya Jurusan Muamalah;
7. Pihak pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam skripsi ini;
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
9. Bapak dan Ibu, kakak-kakak, beserta keluarga besar di Palembang yang tiada hentinya memberika doa, semangat, nasihat, motivasi yang penuh demi keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi dan demi tercapinya cita-citaku.
10. Sahabat-sahabatku Reni Deska Sari, Dwi Monica Apriani, Hikmah Lidaeni, Aulia Rahma, Sucipto, Febri Rohmat Habibi, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan doa untuk keberhasilanku;

11. Sahabat-sahabatku dari SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung Diah Risty Khoirunisa, Nadia Gisti Ameliana, Novtalia Dwi Safitri, Dila Isalia, Bripda Muhammad Deni, dan Bripda Rido Kuncoro yang telah memberi semangat, doa dan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat kecilku Ozy Saputri, yang telah memberi dukungan maupun nasihat yang penuh makna pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Khususnya Jurusan Muamalah C 2016 yang telah membantu penulisan baik tenaga dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Rekan-rekan KKN Kelompok 238 Azahra Safira Adawiyah, Annisa, Dewi Nurhayati, Rica Kristya Rusdiwan, Yuli Yana, Zuliana Ernawati, Syamsul Arif, Adi Nofriadi, Aji Prayoga, Amad Romadi, Budi Setiawan, M. Agung Dwi Laksono yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulisan selama ini dan memberikan semangat pada penulis.
15. Almamater tercinta.

Penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 06 Mei 2020

Penulis

Hidayah Yulianty Harjono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikan Penelitian.....	11
H. Metode Penelian.....	11
 BAB II : PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL	
A. Jaminan Sosial	
1. Pengertian Jaminan Sosial	16
2. Program Jaminan Sosial	22
3. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial	27
B. Jaminan Sosial Dalam Islam	29
C. Program Jaminan Hari Tua.....	50
D. Tinjauan Pustaka	58

BAB III : SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan	61
B. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan	65
C. Sistem Pengembangan Dana Pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan	70
D. Sumber Dana yang Dikelola pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan	74

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN TANGERANG SELATAN

A. Pelaksanaan yang digunakan pada Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua	77
B. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “**Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam**”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.¹

Pengembangan yang dimaksud adalah proses pengembangan dana pada jaminan hari tua yang dikelola untuk mencairkan dana para peserta.

2. Dana

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya.²

3. Jaminan

Jaminan adalah suatu perlindungan dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja.³

4. Hari Tua

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun. Sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Termasuk

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),h. 473

²*Ibid*,h. 207

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 169

dalam pergantian ini adalah jika tenaga kerja tersebut cacat tetap dan total (*total and permanent disability*).⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).⁵

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan mempunyai bagian agama Islam.⁶ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemuka definisi hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Berdasarkan definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Menurut Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definis hukum Islam dengan “koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *Fiqh*.⁷

Kesimpulan dari penegasan judul yang telah diuraikan diatas adalah tinajaun hukum Islam tentang proses pengembangan dana jaminan hari tuayang diambil dari penghasilan yang hilang atau berkurang yang dialami oleh tenaga kerja, dan jaminan tersebut diberikan kepada tenaga kerja yang

⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h.159-160

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h. 760

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.42

⁷Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44

telah memasuki umur produktivitas. Masa umur produktivitas yang dimaksud adalah pada usia 55 atau 56 tahun.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif membahas penelitian ini karena pengembangan dana yang diterapkan pada jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak ada dana yang dikembangkan seperti jaminan hari tua.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif membahas penelitian ini karena sesuai dengan yang sedang penulis tekuni di jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sekarang yang berkembang ini, perekonomian adalah bentuk penting untuk memajukan kebutuhan dalam sehari-hari. Perekonomian yang bisa berkembang sangat berpengaruh untuk para pekerja maupun warga Indonesia yang masih belum mempunyai pekerjaan. Dalam bidang apapun diperlukan tenaga kerja yang ahli ataupun handal. Tingkat produktivitas pekerja yang sangat meningkat juga diperlukan dana jaminan atau dana pensiunan. Karena, pada saat tenaga kerja tersebut tidak lagi untuk

melakukan pekerjaan yang disebabkan masa usia atau masa produktivitasnya sudah melewati maksimum, maka tenaga kerja tersebut berhenti untuk melakukan aktifitas dalam suatu pekerjaan atau bisa disebut juga pensiun. Dalam hal ini, perlu adanya penyelenggaraan jaminan hari tua yang bertujuan untuk memberikan dana kepada tenaga kerja yang telah berhenti yang berguna untuk bertambahnya dalam bidang perekonomian mereka.

Jaminan bagi kaum pekerja di hari tua, kehilangan orang yang mencari nafkah dan ketidakmampuan untuk bekerja merupakan suatu hal yang penting di dalam tingkatan kehidupan daripada masyarakat. Di bawah sosialisme tingkatannya bergantung pada tingkatan perkembangan ekonomi. Namun, hubungannya adalah timbal balik, yaitu bahwa tingkatan jaminan sosial juga memengaruhi ekonomi.⁸ Jaminan hari tua juga bisa disebutkan untuk jaminan kepada tenaga kerja yang telah berhenti bekerja atau mengundurkan diri dari perusahaan yang ia jalani dan tidak memungkinkan lagi baginya bekerja dalam hubungan kerja. Tenaga kerja yang demikian akan membutuhkan dana yang cukup besar sebagai modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya.⁹ Jaminan hari tua juga bisa diambil dananya pada saat tenaga kerja tersebut sudah berhenti atau mengundurkan diri dari pekerjaannya pada perusahaan dengan beberapa syarat. Pada perusahaan yang mempunyai program jaminan hari tua dimana dibawah naungan BUMN adalah salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum berubah menjadi BPJS

⁸Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 130

⁹Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, h. 170

Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan ini bernama Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 dan diatur oleh PP Nomor 36 Tahun 1995, dimana jamsostek ini dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero). Pada tahun 2011, sesuai pada UU Nomor 24 Tahun 2011 ditetapkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan menjadi badan hukum publik.

Selain jaminan hari tua, di BPJS Ketenagakerjaan ada juga program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada waktu melakukan pekerjaan. Sedangkan jaminan kematian adalah jaminan tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.¹⁰ Pada program jaminan hari tua ini untuk mendanakan atau memberikan dana kepada tenaga kerja yang sudah memasuki usia produktif atau tenaga kerja yang ingin berhenti atau mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Dan ini dikumpul atau ditabung dari tenaga kerja setiap bulannya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dana jaminan hari tua tersebut adalah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup. Untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan kegotong-royongan sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁰Ibid, h. 170

Artinya: Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolong dalam melakukan perbuatan keji dan permusuhan. (QS. Al-Maidah (5): 2)¹¹

Pada program-program yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya jaminan hari tua saja, melainkan ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi pada jaminan hari tua mempunyai dana pengembangan yang didanakan, sedangkan pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak ada dana pengembangannya. Jaminan hari tua bisa disebut juga dengan asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut : “ Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.¹² Dalam Islam, terdapat juga asuransi syariah yang bisa disebut *Takaful*. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi), h.349

¹²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 261

dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Takful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-quran pada Surah Al-Maidah ayat 2.¹³

Mengajukan atau mengklaim jaminan hari tua terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS atau Jamsostek asli, Surat Keterangan Bekerja (Varklaring), Buku Tabungan atau Rekening. Pada tata cara pencairan jaminan hari tua harus mengikuti beberapa prosedur. Pertama, peserta mengambil nomor antrian secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pengambilan nomor antrian secara online, peserta bisa menentukan kantor cabang mana yang akan dipilih untuk pencairan jaminan hari tua. Kedua, setelah mengetahui kantor cabangnya, kemudian peserta datang dan mendaftarkan ke kantor yang akan dituju untuk registrasi dengan membawa berkas-berkas persyaratan. Lalu peserta mengisi berkas-berkas yang sudah disiapkan dari pihak BPJS. Berkas tersebut terdiri dari 2 berkas yaitu Formulir untuk jaminan hari tua yang biasa disebut Formulir 5 (F5) dan surat pernyataan yang diberi materai. Ketiga, peserta dipersilahkan menunggu pada sesi verifikasi berkas yang akan diproses. Keempat, jika semua berkas dinyatakan sudah lengkap maka pencairan dana jaminan hari tua tersebut akan diberikan dalam waktu 5 hari atau diproses dalam waktu 5 hari.

¹³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004), h.33

Di masa perekonomian saat ini memang perlu adanya pengembangan dana yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negara atau khususnya pada tenaga kerja itu sendiri. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga tidak lepas dari aturan-aturan dari hukum Islam itu. Dana yang dikembangkan pada program jaminan hari tua ini mengikuti persentase suku bunga atau *BI Rate* pada bank setiap tahunnya. Dana yang dikembangkan untuk tenaga kerja ditambahkan jumlahnya mengikuti persentase suku bunga yang naik. Tetapi, dana yang dikembangkan tersebut bisa saja mengandung riba ataupun tidak. Karena dana tersebut mengikuti persentase dari Bank Indonesia dimana ada penambahan pada dana yang dikeluarkan. Sedangkan dalam Islam riba adalah salah satu kegiatan yang diharamkan. Riba menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.¹⁴ Dalam Firman Allah dijelaskan dalam Al-quran Surah Al-Imran ayat 130, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (Al-Imran (3):130)¹⁵

Dalam program jaminan hari tua ini dimana mengikuti sistem *BI Rate* yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan bisa menimbulkan hal-hal

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.290

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi), h.39

yang diluar dugaan. Akan tetapi, jika jaminan ini menggunakan atau mengikuti sistem BI Rate, akan bertambahnya dana jaminan yang diterima para tenaga kerja apabila sudah melampaui umur produktivitasnya yang bisa saja menguntungkan bagi tenaga kerjanya tersebut. Besarnya dana iuran pada jaminan hari tua ini menurut Pasal 9 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan sebesar 5,70 %. Pada 3,70 % dana tersebut ditanggung oleh perusahaan, sedangkan 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Iuran tersebut dari penghasilan atau upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Artinya dari 5,70% dana iuran tersebut dari perusahaan dan dari iuran tenaga kerja juga. Besarnya iuran jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.¹⁶ Pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak mengikuti sistem BI Rate atau suku bunga terdapat alasan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan program yang dananya tidak dikembalikan lagi ke tenaga kerja. Maksudnya, dana pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bisa dimanfaatkan apabila tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan atau tenaga kerja tersebut meninggal dunia. Jadi, dua jaminan ini tidak diadakan dana pengembangan seperti jaminan hari tua.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap masalah ini perlu diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai pengembangan dana pada jaminan hari tua, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu memberi kejelasan terhadap kekhawatiran penggunaan

¹⁶ Tim Redaksi Permata Press, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*, (Jakarta: Permata Press), h.256

hususnya dalam pengguna atau yang memanfaatkan pengembangan dana jaminan hari tua menurut hukum Islam. Penelitian ini berjudul **“Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pengembangan dana jaminan hari tua menurut Hukum Islam. Sub-Fokus penelitian yang dihadapi ialah pengembangan dana jaminan hari tua

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan dalam pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan.

G. Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis, berguna untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pengembangan dana jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Serta dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
2. Secara praktis, berguna untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang Mu'amalah

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Kedua metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola yang dihadapi.

Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik pengembangan dana pada jaminan hari tua dengan konsep hukum

Islam untuk melahirkan sebuah prespektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada dampak dari pengembangan dana jaminan hari tua.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai penggunaan sistem promosi dengan satu harga. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka *library research*, sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian, akan dianalisa deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pengembangan dana jaminan hari tua ditinjau dari hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan dan pada jamianan hari tua, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang berjumlah 38 orang.

b. Sample

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

penentuan sample yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui. Dalam hal ini penentuan sample sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Adapun yang menjadi sample penelitian ini adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan yang berjumlah 10 orang.

5. Metode PengumpulanData

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara.

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mewawancarai 10 orang responden.

b. Observasi.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di

¹⁸ *Ibid*, h.83

selidiki. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pengembangan dana jaminan hari tua.


c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁹

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing



Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

b. Sistemating

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi, observasi. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, karena jenis data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa pembahasan dan kemudian hasil analisis terjawab permasalahan penelitian.

Metode berfikir ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode berfikir induktif akan didapatkan suatu penjelasan khusus mengenai pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua. Dari factor tersebut diambil kesimpulan secara umum tentang bagaimana tinjauan hukum Islam memandang hal tersebut. data

kepastakaan kemudian menjelaskan sebagai pengembangan dana jaminan hari tua dalam syariah, kemudian peneliti menyusun laporan untuk menunjukkan data yang dikumpulkan dan diolah, sehingga dalam pembuatan laporan akan sesuai dengan keadaan dan permasalahan ada.²⁰



²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.103

BAB II

PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL

A. Jaminan Sosial

1. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial berasal dari kata *Sosial* dan *Security*. Kata *Sosial* menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*). Sementara *Security* diambil dari bahasa latin “*securus*” yang bermakna “se” pembebasan atau liberation dan “*curus*” yang berarti kesulitan atau *uneasiness*. Dengan demikian, jaminan sosial secara harfiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.”²¹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial menurut UU No. 24 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²¹ Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, (Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia, 2009), h.50

Sedangkan menurut Pasal 4, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan. Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Di Indonesia telah lama diselenggarakan program jaminan sosial yaitu oleh PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen, PT. Asabri, Badan Pelaksanaan JPKM dan berbagai program jaminan sosial mikro, tetapi cakupannya masih relatif sempit atau rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal.²²

Pengertian jaminan sosial mencakup aspek hukum, aspek politik, dan aspek ekonomi. Aspek hukum jaminan sosial berkaitan dengan tanggungjawab negara untuk melaksanakan mandat Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), (2), (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap berbagai resiko sosial ekonomi. Aspek politik jaminan sosial adalah upaya pembentukan politik dari pemerintah. Aspek ekonomi jaminan sosial adalah terkait dengan redistribusi pendapatan melalui mekanisme kepesertaan wajib dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan. Jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan negara dan sekaligus

²² *Ibid*, h.50

peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud daya beli masyarakat dalam jangka panjang.²³

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara guna menjamin hak warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, sebagaimana dalam Deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1948 dan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 102 Tahun 1952.

Pengertian jaminan sosial menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 1998 adalah jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapat sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, hari tua dan kematian dini, perawatan medis termasuk, pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.

Menurut Purwoko, jaminan sosial sangat beragam. Dilihat dari pendekatan asuransi sosial, maka berarti jaminan sosial merupakan suatu metoda penanganan resiko hubungan industri yang berbasis pada hukum bilangan besar (law of large numbers). Dari sisi bantuan sosial, maka

²³ *Ibid*, h.51

jaminan sosial berarti sebagai dukungan pendapatan bagi komunitas kurang beruntung untuk keperluan konsumsi.²⁴

Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu jaminan dan sosial, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain, sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut jika dianalogiskan pihak yang satu adalah negara serta pihak yang lain adalah masyarakat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dalam suatu negara wajib menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan warganya yang membutuhkan.²⁵

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.²⁶ Jaminan sosial juga berarti salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial merupakan bagian ruang lingkup dari kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial dalam hukum positif adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmaniah, rohaniah, maupun

²⁴ *Ibid*, h.51-52

²⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), h.240

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.26

sosial, dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu.

Secara garis besar, jaminan sosial dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat jangka panjang seperti jaminan hari tua, pensiun, sementara putus kerja, dan kematian serta jaminan yang bersifat jangka pendek seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan diri. Pendanaan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial dapat dipaksakan kepada setiap penduduk atau pemberi kerja. Pemaksaan pembayaran iuran, seperti halnya pembayaran pajak, dilakukan karena mekanisme pasar (tidak ada pemaksaan) gagal memenuhi tujuan jaminan sosial. Asuransi komersial hanya bisa memberikan jaminan kepada yang mau dan mampu membeli saja.²⁷

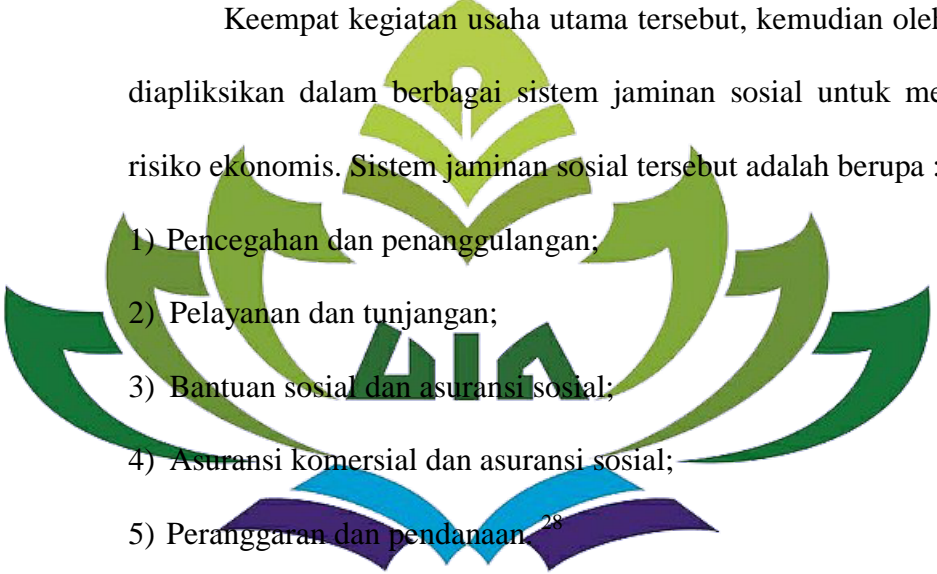
Pengertian jaminan sosial yang telah dijelaskan, Santoeno Kertonogoro mengelompokkan empat usaha dalam jaminan sosial, yaitu:

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social service*).
- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebutkan sebagai bantuan sosial (*social assistance*).

²⁷ Siti Ummu Adilla dan Sri Anik, "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan", Vol. 4 No. 3 (September – Desember 2015), h. 560-561

- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai saran sosial (*social infra structure*).
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*).

Keempat kegiatan usaha utama tersebut, kemudian oleh beliau diaplikasikan dalam berbagai sistem jaminan sosial untuk mengatasi risiko ekonomis. Sistem jaminan sosial tersebut adalah berupa :

- 
- 1) Pencegahan dan penanggulangan;
 - 2) Pelayanan dan tunjangan;
 - 3) Bantuan sosial dan asuransi sosial;
 - 4) Asuransi komersial dan asuransi sosial;
 - 5) Peranggaran dan pendanaan.²⁸

2. Program Jaminan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993, program jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)
- c. Jaminan Hari Tua

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*..., h.27

Adapun jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993).

Untuk JKK, JKM, dan JHT sifatnya adalah wajib, sedangkan untuk JPK berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 apabila pengusaha telah memiliki program jaminan kesehatan yang lebih baik dibandingkan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar dari jamsostek, tidak diwajibkan ikut program JPK (Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993).²⁹

Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja di atas ditur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, beserta keluarganya.

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan

²⁹ Hidayat Muharam, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.57-58

ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.³⁰

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja diatur di dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah :

- 1) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak;
- 2) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- 3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Pengertian kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat

³⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h.126-127

karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelekaan kerja yang berkisar antar 0,24% s.d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.³¹

b. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 7,5 Juta terdiri atas Rp 6 juta santunan kematian dan Rp 1,5 Juta uang pemakaman (berdasarkan ketentuan PP Nomor 64 Tahun 2005) dan santunan berkala.

Jaminan kematian diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia. Santunan kematian diberikan langsung kepada keluarga yang ditinggalkan tenaga kerja. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 :

- 1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan keluarganya berhak atas jaminan kematian.

³¹ *Ibid*, h.127

- 2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pemakaman dan santunan berupa uang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, urutan penerimaan yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian sebagai berikut :

- 1) Janda atau duda;
- 2) Anak;
- 3) Orang tua;
- 4) Cucu;
- 5) Saudara kandung;
- 6) Mertua.³²

c. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua diberikan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun. Jaminan hari tua dapat diberikan kepada tenaga kerja yang putus hubungan kerja dengan minimal masa kepesertaan 5 tahun terhitung dari masa pendaftaran.

Pembayarannya dilakukan sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala pada pekerja, karena telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan dokter. Dalam hal pekerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu. Iuran program jaminan hari tua ditanggung perusahaan =

³² *Ibid*, h. 138

3,7% dan ditanggung tenaga kerja= 2%. Kemanfaatan jaminan hari tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.³³

Setiap orang hakikatnya ingin hidup dengan layak dan sejahtera, dan kesejahteraan itu merupakan hak bagi setiap warga negara, oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial pada warga negaranya yang menjamin bahwa setiap warganya dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Selain berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang mencukupi berikut dengan jaminan sosial ketenagakerjaannya.³⁴

3. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial

Dari beberapa definisi jaminan sosial dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan jaminan sosial pada prinsipnya adalah :

- a. Sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja/buruh guna mengatasi risiko-risiko ekonomis atau sosial atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti :
 - 1) Kebutuhan akan pelayanan medis;
 - 2) Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian penghasilan yang disebabkan karena sakit, hamil, kecelakaan kerja dan penyakit jabatan, hari tua, cacat, kematian pencari nafkah.
 - 3) Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.

³³ *Ibid*, h. 139

³⁴ Ery Dwi Antono Riyadi, "Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial Untuk Petugas K3l Di Lingkungan Universitas Padjadjaran", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No 2 (Mei 2019)

- b. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh yang memilih peranan besar bagi pelaksana pembangunan.³⁵

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya jaminan sosial bagi pekerja/buruh, yaitu sebagai berikut :

- a. Jaminan sosial menciptakan ketenaga kerja bagi pekerja/buruh dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja.
- b. Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen, berarti pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerja/buruhnya, dimana biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk jaminan sosial ini bersifat mendadak sehingga tidak bisa diperhitungkan terlebih dahulu.
- c. Dengan adanya jaminan sosial, praktis akan menimbulkan ikatan bagi pekerja/buruh untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpindah ke tempat lain.
- d. Jaminan sosial juga akan ikut menciptakan ketenangan kerja serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- e. Dengan adanya program jaminan sosial ini, kepastian akan perlindungan terhadap risiko-risiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama untuk melindungi kelangsungan penghasilan pekerja/buruh

³⁵ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*...., h.35-36

yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.³⁶

B. Jaminan Sosial Dalam Islam

1. Pengertian Jaminan Sosial Dalam Islam

Dalam Islam, jaminan sosial disebut juga asuransi syariah yang bisa disebut *Takaful*. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukan untuk menanggung risiko. *Takaful* dalam pengertian ini sesuai dengan Al-quran pada Surah Al-Maidah ayat 2. *Yakfulu* dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam surah An-Nisaa ayat 85 yang artinya “*barang siapa yang memberi syafaat (melindungi hak-hak orang dari kemudharatannya) yang buruk, niscaya ia akan memikul (resiko) bagian daripadanya*”.³⁷ *Takaful* dalam pengertian muamalah diatas ditegakkan pada prinsip-prinsip dasar :

a. Saling bertanggung jawab

Dalam saling bertanggung jawab, ada ayat yang menjelaskan tentang saling tanggung jawab. Dalam Surah Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi :

³⁶ *Ibid*, h.36-37

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004), h.33

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”
(QS. Al-Mudatstsir: 38)³⁸

Banyak hadist Nabi Saw. seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْأَنْبِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah ibaratnya seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain”. (HR Bukhari dan Muslim)³⁹

b. Saling bekerja sama dan saling membantu

Allah Swt. Memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebijakan dan takwa, sebagaimana firman-Nya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...” (Al-Maidah : 2)

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*..., h.995

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 383

Hadist Nabi Saw. mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hdiup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah Swt. Allah akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya.

c. Saling melindungi

Hadist Nabi Saw. mengajarkan bahwa sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur dengan nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. “orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan.”⁴⁰

Dari prinsip-prinsip dasar diatas, maka asuransi syariah atau *takaful* merealisir perintah Allah Swt., dalam Al-Quran dan Rasulullah saw., dalam al-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mementingkan orang lain atau masyarakat.

Jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*) adalah salah satu rukun ekonomi Islam yang paling asasi (mendasar dan esensial) di antara tiga rukun ekonomi Islam lainnya. Prof Dr Ahmad Muhammad 'Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Arab Saudi, dalam buku *An-Nizam al-Iqtishadity al-Islami*, menyebutkan, rukun paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al-milkiyyah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*).⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, h. 34

⁴¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2004), h.33

Pada ekonomi kapitalisme, jaminan sosial tidak dibahas secara rinci. Akan tetapi, sistem ini hanya menekankan kepada kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam kepemilikan harta yang mutlak, cara memilikinya sampai dengan penggunaannya merupakan hak mutlak setiap individu yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Sementara itu, ekonomi sosialisme berusaha mewujudkan jaminan sosial melalui persamaan dalam kepemilikan, di mana kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan ekonomi Islam benar-benar menjamin kebutuhan-kebutuhan individu tanpa melarang kepemilikan individu.⁴²

Asuransi disebut pula *takaful*, *ta'min*, atau *tadhamun*, yaitu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* melalui akad sesuai dengan syariah.⁴³

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴⁴

⁴² Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2017), h. 238-239

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 301.

⁴⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97

Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh DSN MUI di atas dinyatakan bahwa pola pengembalian dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ini mengandung arti bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat.⁴⁵

Jaminan sosial dalam studi Islam terdiri dari dua macam. Pertama, jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui instrumen-instrumen filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, waqaf, dan bahkan termasuk pajak. Alquran sering menyebut doktrin jaminan sosial dalam bentuk instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya.

Dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 552.

sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Dengan tambahan penjelasan bahwa tunjangan hari tua hanya akan diberikan setelah seseorang melewati batas usia produktif. Sedangkan untuk jaminan keamanan, keadilan, pemerataan ekonomi yang terangkum dalam sandang, pangan, dan papan adalah hak masyarakat baik dalam usia produktif maupun non-produktif.⁴⁶

Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara. Jaminan sosial dalam bentuk ini bertujuan humanis (filantropis) serta tujuan-tujuan bermanfaat sosial lainnya menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan. Jaminan sosial dalam definisi ini tidak mewajibkan rakyat membayar sejumlah iuran (premi) ke lembaga negara (BPJS) karena sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, diyat, kafarat, warisan berlebih, dan lainnya.

Kedua, jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (*at-takmin al-ta'awuniy*). Dalam konsep jaminan sosial, baik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau.

Konsep jaminan sosial dalam bentuk *at-takmin al-ta'awuniy* ini merupakan implementasi dari perintah Alquran agar hamba-Nya saling menolong (ta'awun) dan saling melindungi. Cukup banyak ayat Alquran, apalagi hadits Nabi Saw yang memerintahkan agar manusia saling

⁴⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2017), h. 241

menolong, saling melindungi, saling menyayangi. Implementasi dari doktrin syariah tersebut diwujudkan dalam bentuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.⁴⁷

Dijelaskan dalam Al Qur'an surat Yusuf: 46-49 Allah SWT juga mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan Negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang.¹⁰ Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Nabi Yusuf dalam hal ini menjawab supaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan. Sangat jelas dalam ayat-ayat diatas kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat-ayat diatas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sisitem proteksi yang dikenal dalam

⁴⁷ <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/16/mzi35n-bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah>, diakses tanggal 03 Maret 2020

mekanisme asuransi.⁴⁸ Pada asuransi syariah ini ada beberapa prinsip-prinsip yang diterapkan, sebagai berikut :

- a. Tauhid (*Unity*)
- b. Keadilan (*al-adalah*).
- c. Tolong menolong (*al-ta'awun*)
- d. Kerjasama (*al-Musyarakah*)
- e. Amanah (*al-amanah*)
- f. Kerelaan (*al-ridha*)
- g. Menghindari Riba (*tahrimu al-riba*)
- h. Menghindari judi (*Maisir*)
- i. Menghindari ketidakpastian (*Gharar*)⁴⁹

Islam menetapkan sumber-sumber keuangan untuk pelaksanaan jaminan sosial sebagai berikut:

- a. Zakat, sebagai kewajiban dan rukun yang ketiga dari agama Islam
- b. Infaq, harta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain dan kemaslahatan umum karena Allah tanpa dibatasi sampai berapapun
- c. Wakaf, terdiri dari dua macam, yakni wakaf yang diberikan sebagai jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan wakaf untuk amal kebaikan umum,
- d. Wasiat
- e. Ghanimah atau harta rampasan perang

⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Sistem Operasional....*, h. 296-297

⁴⁹ <https://www.slideshare.net/erayahusuwondo/perindungan-sosial-dan-jaminan-sosial-dalam-perspektif-islam>, diakses pada tanggal 26 April 2020

- f. Penggalian harta terpendam dari dalam bumi, baik barang tambang (rikaz), barang yang disimpan dalam tanah (kanz) dan lain-lain
- g. Nadzar, seseorang yang bernadzar akan memberikan sesuatu dengan suka rela kalau maksud dan cita-citanya tercapai, ia wajib memenuhinya dan memberikan kepada golongan yang berhak mendapat jaminan sosial
- h. Kifarat, yakni denda untuk menebus kesalahan
- i. Qurban, (10) Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa
- j. Kas Perbendaharaan Negara.

Pada masa Umar bin Khattab, sumber penerimaan negara di luar zakat semakin banyak, maka didirikan dewan perbendaharaan dan administrasi negara. Dewan Perbendaharaan Negara di masa itu tidak hanya menghimpun dinar dan dirham, tetapi juga data segala penghasilan pekerja, data orang-orang yang wajib membayar zakat (muzakki), dan pembayar jizyah (penduduk non-muslim).⁵⁰

Ahmad Zaki Yumani adalah menteri urusan minyak dan pertambangan kerajaan Arab Saudi, dalam salah satu karyanya mengupas masalah jaminan sosial yang ditinjau dari segi Agama Islam yang dikemukakannya bahwa prinsip jaminan sosial telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah. Jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu asas kemanusiaan asas manfaat, asas keadilan. Dalam hal ini asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Assa

⁵⁰ http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnyazakat-dan-sumber-sumber-jaminan-sosial-dalam-islam_2269, diakses pada tanggal 03 Maret 2020

tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran bahwa adanya persamaan antar manusia di hadapan Allah SWT, hanya saja yang membedakannya adalah ketakwaannya.⁵¹

Di masa Rasulullah, yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan sosial bagi masyarakat adalah Pemimpin Negara. Ketika seseorang wafat, dan meninggalkan anak-anak yang lemah (dhuafa), dimana pihak kerabatnya tidak ada yang mampu untuk membantu, maka tanggung jawab diambil alih oleh negara.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah : “Aku adalah orang yang paling dekat atas kalian semua dalam kitab Allah, maka siapapun dari kalian yang meninggalkan hutang atau anak cucu maka panggillah aku karena aku adalah walinya. Dan siapapun dari kalian yang meninggalkan harta warisan maka hendaklah diwariskan kepada ahli warisnya siapapun dia (Hadits Imam Ahmad Bin Hanbal Nomor 7888).”⁵²

Ada beberapa alasan yang memperkuat perlu adanya pembangunan jaminan sosial dalam upaya kesejahteraan sosial dengan berbasis Alquran , yaitu sebagai berikut :

- a. Kaum muslimin yang merupakan penduduk terbesar negeri ini meyakinkan bahwa Alquran itu firman Allah yang merupakan buku petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan yang

⁵¹ Nurul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, h.

⁵² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Bandung: Diponegoro, t.th), Jilid 2, h. 858.

baik. Jika dalam masalah sosial pembangunan kesejahteraan sosial seperti pengetahuan kualitas keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum dhu'afa dan ketenagakerjaan tidak menjadi perhatian utama pemerintah serta tidak ada ketegasan dan keberanian dalam memerangi kebatilan, bahkan terus menerus mengabaikan pesan Alquran yang mewajibkan membela kaum lemah dan memihak kepada perlindungan orang miskin dari ancaman gurita kapitalis yang mematikan rakyat kecil dengan jarring-jaring sosial yang mengitari orang miskin.

b. Negeri ini sebuah negeri yang majemuk, didirikan oleh berbagai komponen bangsa, ibarat sebuah perusahaan kaum muslimin adalah pemilik saham terbesar. Oleh sebab itu, kaum muslimin memiliki tanggung jawab terbesar pula dalam membangun kesejahteraan bangsa ini. Ironisnya pemilik saham tersebut yang sekaligus penduduk terbesar negeri ini adalah bagian terbesar dari penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka belum menikmati kesejahteraan dalam usia negeri ini menjelang 66 tahun. Banyak hal yang menjadi factor penyebabnya, namun yang paling mendasar adalah kita belum sepenuhnya menggunakan konsep Alquran dalam membangun kesejahteraan sosial dinegeri mayoritas muslim ini.

c. Sumber dana untuk membiayai pembangunan kesejahteraan sosial dinegeri ini yang mayoritas muslim ini tidak mengandalkan dari Bank Dunia yang merupakan lembaga keuangan kapitalis, dan tidak juga

datang dari bantuan asing. Tetapi, dengan menggalang dana dari potensi umat islam itu sendiri melalui zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf, sebagaimana dirintis oleh kelompok umat dengan kelembagaan yang mandiri manajemen modern , serta didukung oleh manusia-manusia yang amanah dan professional.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini, bentuk kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

2. Dasar Hukum Takaful Dalam Islam :

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul,

maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh ahli hukum Islam.

Landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, piagam Madinah, praktik sahabat, *ijma'*, *qias*, *syar'u man qablana*, dan *istihsan*.⁵³

a. Al-Quran

Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah Surah Al-Maidah (5) : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya". (QS Al-Maidah [5] : 2)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam oraktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong

⁵³ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.104

salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (peril).⁵⁴

b. Sunnah Nabi

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ
 فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
 يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ
 قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَذَرُونَ سُنَّةَ بَيْنَهُمْ ،
 إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ،
 وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya : “Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (cacat) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (cacatnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut suka membantu kawannya. Dan barangsiapa melintasi suatu jalan untuk mencari

⁵⁴ Ibid, h.105

ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tiada berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Qur'an dan mengkajinya bersama-sama, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, dan malaikat akan mengerumuni mereka, serta oleh Allah mereka akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang berada di sisi-Nya. Sedang siapa yang memperlambat pengamalan (ilmu)nya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasab keturunannya (tidak lekas naik derajat).” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁵

c. Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini (*aqilah*). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.

Sebagai dalil dari kebolehan memakai ijma dalam menetapkan hukum ini adalah : Artinya : “Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah SWT. Juga baik.”⁵⁶

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”*, Jilid: 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153.

⁵⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.122

d. Piagam Madinah

Rasulullah SAW. mengundang sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut. Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka *aqilah* dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (*diyat*) kepada musuh, sebagai pesanan yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungansosial (*social insurance*).⁵⁷

e. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan

⁵⁷ *Ibid*, h. 123

daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁵⁸

f. Syar'u Man Qablana

Syar'u Man Qablana dalam pandangan Wahhab Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum (*istinbath al-hukm*) dengan mengacu pada cerita dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum syar'i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi.

Contoh dari metode *Syar'u Man Qablana* adalah kewajiban menjalankan puasa. Ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 183.

Dalam masalah ini, praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi, yang pernah dikerjakan oleh suku kuno Arab pra-Islam adalah praktik *aqilah*. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh. Sebenarnya si pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut. Namun, kelompok menanggung pembayarannya karena si pembunuh kebetulan adalah anggotanya. Pada zaman jahiliah, harga yang dibayar oleh pelaku pembunuhan konon sebanyak sepuluh ekor unta betina. Abdul Muthalib menyelamatkan putranya dengan korban sepuluh unta betina.

⁵⁸ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h.113

g. *Ihtisan*

Ihtisan dalam pandangan ahli ushul adalah memandang sesuatu itu baik. Kebiasaan dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.⁵⁹

h. Fatwa DSN-MUI

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu berupa Fatwa DSN-MUI, diantaranya :

- 1) Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 2) Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah Asuransi
- 3) Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil 'Ujah pada Asuransi Syariah
- 4) Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 5) Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- 6) Fatwa No.43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, h.123-124

⁶⁰ Burhanuddin S, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah...*,h. 103-115

3. Rukun Dan Syarat Takafful Dalam Islam

Dalam pelaksanaan asuransi syari'ah harus dilandasi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam agama Islam, karena dapat mempengaruhi sah dan tidaknya pelaksanaan asuransi tersebut.⁶¹

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam asuransi syariah adalah :

- a. *Sighat al-'aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- b. *Al-mta'qidain* (pihak-pihak yang beraqad)
- c. *Al-ma'qud* (obyek aqad)

Syarat-syarat dalam asuransi syari'ah adalah :

- a. Baligh yaitu orang yang melakukan kegiatan asuransi harus baligh atau dewasa.
- b. Berakal yaitu seseorang yang melakukan kegiatan asuransi harus berakal, jika akalnya terganggu seperti sakit jiwa dan lainnya maka tidak sah.
- c. Tidak ada unsur paksaan yaitu para pihak harus memiliki kehendak sendiri dan tidak dipaksa.
- d. Jelas yaitu apa yang diperjanjikan harus jelas. Semua perjanjian yang tidak diketahui tujuan dan apa yang diperjanjikan akan menjadi tidak sah dan hal ini sangat dilarang dalam syari'at Islam.
- e. Tidak ada unsur riba. Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba, melainkan harus menggunakan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan satu pihak dengan pihak lain.⁶²

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.96

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut:

- a. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. Makful 'anhu, adalah orang yang berutang.
- d. Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.⁶³

4. Macam-macam Takafful Dalam Islam

- a. Takafful Keluarga

Takafful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi takaful. Jenis takaful keluarga meliputi

.⁶⁴

- 1) Takaful Dana Berencana (Dana Investasi)

⁶² Ibid, h.97

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.

⁶⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.138-139

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dan sebagai dan investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

2) Takaful Dana Haji

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan untuk biaya menjalankan ibadah haji.

3) Takaful Pendidikan

Yaitu suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri peserta asuransi.

4) Takaful Dana Jabatan

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat atas suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai dana santunan investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

5) Takaful Al-Khairat Keluarga

Yaitu program asuransi ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

6) Takaful Kecelakaan Diri Individu

Yaitu program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

7) Takaful Kesehatan Individu

Yaitu program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

b. Takaful Umum

Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi.⁶⁵

1) Takaful Kebakaran

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat, berikut resiko yang ditimbulkan dan juga diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

2) Takaful Kendaraan Bermotor

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungkan akibat

⁶⁵ Hendi Suhendi Dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 68

terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian maupun secara keseluruhan dari akibat kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

3) Takaful Rekayasa

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasang kontruksi baja atau mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

4) Takaful Pengangkutan

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami kecelakaan selama dalam perjalanan ke laut, udara, darat.

5) Takaful Aneka

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takafil yang telah ada.

C. Program Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha, namun

pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁶

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.

Pada Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua adalah Jaminan Hari Tua selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total.

Jaminan bagi kaum pekerja di hari tua, kehilangan orang yang mencari nafkah dan ketidakmampuan untuk bekerja merupakan suatu hal yang penting di dalam tingkatan penghidupan daripada masyarakat. Di bawah sosialisme tingkatannya bergantung pada tingkatan perkembangan ekonomi. Namun, hubungannya adalah timbal balik, yaitu bahwa tingkatan jaminan sosial juga memengaruhi ekonomi.⁶⁷

Besarnya dana iuran pada jaminan hari tua ini menurut Pasal 9 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan sebesar 5,70 %. Pada 3,70 % dana tersebut ditanggung oleh perusahaan, sedangkan 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Iuran tersebut dari penghasilan atau upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

⁶⁶ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.160

⁶⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.130

Besarnya iuran jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.⁶⁸

Upah yang dimaksud adalah upah pokok dan tunjangan tetap sebulan, apabila upah dibayarkan harian, maka dasar perhitungan pembayaran iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima). Pekerja borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. Pekerja yang pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagi Peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar Lampiran PP No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu tersebut sebagai dasar perhitungan iuran sesuai penghasilan masing-masing. Dasar perhitungan dalam lampiran tersebut akan dievaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁹

Program JHT ini merupakan satu kesatuan dengan JKK yang diharuskan bagi setiap peserta dengan sistem tabungan. Karena, jika pada program JKK sebagai antisipasi perawatan ketika terjadi risiko, maka

⁶⁸ Tim Redaksi Permata Press, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*, (Jakarta: Permata Press), h.256

⁶⁹ http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24, diakses pada tanggal 04 Mei 2020

pada JHT sebagai antisipasi untuk kebutuhan dana yang akan datang disaat sudah tidak bekerja lagi.⁷⁰

Pada program jaminan hari tua ini untuk mendanakan atau memberikan dana kepada tenaga kerja yang sudah memasuki usia produktif atau tenaga kerja yang ingin berhenti atau mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Dan ini dikumpul atau ditabung dari tenaga kerja setiap bulannya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dana jaminan hari tua tersebut adalah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup. Untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan kegotong-royongan sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolong dalam melakukan perbuatan keji dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah (5): 2)⁷¹

Besar iuran jaminan hari tua di atas jelas lebih besar jika dibandingkan dengan besarnya iuran tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Besarnya iuran tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ini adalah 2,5% dari upah pekerja/buruh sebulan dengan perincian 1,5%

⁷⁰ https://www.researchgate.net/publication/334998995_Akad_Program_Ba_dan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial_Bpis_Ketenagakerjaan_Dalam_Konteks_Ekono_mi_Syariah, diakses pada tanggal 22 April 2020

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi), h.349

ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 1% ditanggung oleh pekerja/buruh.

Peningkatan besarnya iuran ini semata-mata bertujuan :

1. Untuk meningkatkan tanggung jawab pengusaha terhadap para pekerja.
2. Untuk meningkatkan jaminan yang diperoleh pekerja/buruh guna meringankan risiko ekonomis di hari tuanya.⁷²

Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan, yang dibayarkan sekaligus apabila :

1. Peserta mencapai usia 55 tahun.
2. Meninggal dunia.
3. Cacat total.

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan dibayarkan langsung oleh badan penyelenggara kepada pekerja yang bersangkutan atau ahli warisnya, dalam hal :

1. Pekerja yang bersangkutan telah mencapai usia 55 (lima puluh enam) tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun.
2. Pekerja yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau badan penyelenggara.
3. Pekerja yang bersangkutan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun kematian dini.

⁷² Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja...*, h.165

4. Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK) oleh perusahaan, dan pekerja yang bersangkutan tidak mendapatkan pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak pekerja mulai berhenti bekerja.⁷³ Manfaat Jaminan Hari Tua sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun.
- b. Diambil maksimal 30% dari total saldo untuk uang perumahan.⁷⁴

Jaminan hari tua mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- 2) Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- 3) Kepesertaan perorangan.

⁷³ Tim Pustaka Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Visimedia,) h.6

⁷⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.110

- 4) Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Dalam pembayaran iuran manfaat program jaminan hari tua ini, para peserta harus mengajukan persyaratan sebagai berikut :

1. Peserta Mencapai Usia Pensiun

Manfaat JHT dibayarkan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

- a. Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan; dan
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

2. Peserta Yang Mengundurkan Diri

Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat Peserta bekerja; dan
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

3. Peserta Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Manfaat JHT dibayarkan tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

- a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial; dan
- c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

4. Peserta Yang Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-Lamanya



Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia;
- b. fotokopi paspor;
- c. fotokopi visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

5. Peserta Mengalami Cacat Total Tetap

Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun, diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

- a. Asli kartu BPJS Ketenagakerjaan; dan

- b. Surat keterangan dokter.

6. Peserta Meninggal Dunia

Manfaat JHT dibayarkan kepada ahli waris Peserta secara tunai dan sekaligus. Ahli waris Peserta meliputi:

- a. Janda;
- b. Duda; dan
- c. Anak.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- 2) Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian, kelurahan;
- 3) Surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang; dan
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.



Apabila pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta tidak ada, JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penelitian. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Peneliti menemukan beberapa

⁷⁵ http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24, diakses pada tanggal 04 Mei 2020

penelitian yang terkait dengan jaminan sosial pada jaminan hari tua, sebagai berikut :

Pertama, yaitu yang ditulis dengan Aulia Rahman Pasaribu pada tahun 2017 dengan judul “Dana Jaminan Hari Tua Di Indonesia Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*”. Penelitian ini menggunakan landasan *Maqashid Ash-Syariah*, yang mana difokuskan pada perencanaan program Jaminan Hari Tua dimana perencanaan tersebut belum sesuai atau belum mengarah pada kelayakan hidup untuk masyarakat.⁷⁶

Kedua, yaitu yang ditulis dengan Novindry Dian Anggraini pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 99 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam dalam Undang-undang, yang mana difokuskan pada penyandang disabilitas yang masih banyak tidak mendapatkan rehabilitasi dan jaminan sosial.⁷⁷

Ketiga, yaitu yang ditulis dengan Pangesti Yofitasari pada tahun 2019 dengan judul “Analisi Pengaruh Kualitas Pelayanan Atas Klaim Program Jaminan Hari Tua (JHT) Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, yang

⁷⁶ Aulia Rahman Pasaribu, *Dana Jaminan Hari Tua Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, tersedia di <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11157> diakses pada tanggal

⁷⁷ Novindry Dian Anggraini, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 99 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, tersedia di <http://repository.radenintan.ac.id/7681> diakses pada tanggal

mana difokuskan pada pelayanan untuk tingkat kepuasan konsumen dalam melayani klaim Jaminan Hari Tua masih kurang efektif.⁷⁸

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam”, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan dana Jaminan Hari Tua dimana dana pengembangan tersebut mengikuti sistem suku bunga BI Rate yang secara tidak sadar bisa mengandung riba menurut Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu tentang program Jaminan Hari Tua yang belum sesuai pada kelayakan hidup masyarakat serta pelayanannya yang masih kurang efektif.

Peneliti tertarik untuk lebih dalam lagi meneliti tentang pengembangan dana Jaminan Hari Tua yang di lihat dari hukum Islam, agar nanti tidak ada keraguan didalam masyarakat. Buku-buku dan skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

⁷⁸ Pangesti Yofitasari, *Analisi Pengaruh Kualitas Pelayanan Atas Klaim Program Jaminan Hari Tua (JHT) Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, tersedia di <http://eprints.walisongo.ac.id/9663/> diakses pada tanggal

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2007.

T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971.

B. Al-Hadits

Al-Imam Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Ibnu Hajar 'Al-Asqlani, *Bulughul Maram*, Bandung: C.V Diponegoro, 1986.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jilid: 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram*, Riyadh: Dar Al-Da'i, 1421.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Bahjatul Imaniyah, *Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah*, (online), tersedia di : [https://www.researchgate.net/publication/334998995_Akad_Program_Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial_Bpjs_Ketenagakerjaan_Dalam_Konteks_Ekonomi_Syariah_\(22_April_2020\).](https://www.researchgate.net/publication/334998995_Akad_Program_Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial_Bpjs_Ketenagakerjaan_Dalam_Konteks_Ekonomi_Syariah_(22_April_2020).)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

D. Peraturan dan Perundang-Undangan

Achmad Hafiz, *Kumpulan Regulasi BPJS Ketenagakerjaan*, Jakarta: 2017.

Erik, Ari Y.A, dan Navista, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

M. Yasir Arafat, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Permata Press, 2007.

Megah, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015*, Permata Press.

E. Buku-Buku Penunjang

- Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Emir Soendoro, Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari, Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia, 2009.
- Ery Dwi Antono Riyadi, Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial Untuk Petugas K31 di Lingkungan Universitas Padjajaran, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 2, Mei 2019.
- Esti Rahayu Suwondo, *Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dalam Perspektif Islam*, (online), tersedia di : <https://www.slideshare.net/erahayusuwondo/perlindungan-sosial-dan-jaminan-sosial-dalam-perspektif-islam> (26 April 2020).
- Ibnu Absyar, *Menjadi Bijak dan Bijaksana*, (Online), tersedia di : <https://books.google.co.id/books?id=dIzhDwAAQBAJ&pg=PT60&lpg=PT60&dq> (14 Mei 2020).
- Gemala Dewi, Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Bogor: Graha Indonesia, 2011.
- Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, Asuransi Takafil Dari Teoritis Ke Politik, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1933.

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) : Konsep Operasional, Jakarta: Graha Insani Pers, 2004.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Puwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Pedoman Penulisan Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Siti Ummu Adilla dan Sri Anik, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Vol. 4 No. 3, Desember 2015.

Sugino, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2012

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Tim Pustaka Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta: Visimedia.

Tim Redaksi Permata Press, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Jakarta: Permata Press.

Zaelani Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Zaky Hamzah, *BPJS dan Jaminan Sosial Syariah*, (online), tersedia di : <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/16/mzi35n-bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah> (3 Maret 2020).

F. Wawancara

Aan Lesmana, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Arif Irman Setya W, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Diah Amita, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Ernawati, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Foany Septiani, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan,
Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Gusfa Rendi, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan,
Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Humaidi Chandra Wijaya, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan
Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Muhammad Richard, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang
Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Nita Astutik, Wawancara Dengan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan,
Tangerang Selatan, 19 Maret 2020.

Sanusi, Wawancara Dengan Kabid Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Tangerang
Selatan, Tangerang Selatan, 19 Maret 2020

